

ZAKAT DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

Nurhasanah*

Abstract: *Zakat in Malaysia and its' Economical Perspective.* *Zakâh* is the implications of the high level of practice Muslims toward the teachings of Islam in Malaysia. It has been carried out since the pre-colonial, colonial times, post-independence, 1957, 80s, and 90s to the present. Regulatory changes are not necessarily set zakat source in accordance with the economic development and professional management. In *zakâh* management, government noted that the potential fellowship *zakâh* increased in accordance with the economic progress of the Muslim community. To foster public confidence in the management of *zakâh*, government through the Majelis Islam Wilayah Persekutuan (MAIWIP) established the Center levy *zakâh* (PPZ) in 1991 in order to create a professional *zakâh* management by implementing corporate systems.

Keywords: *zakâh*, Malaysia, economy, corporate

Abstrak: *Zakat di Malaysia dalam Perspektif Ekonomi.* Zakat sebagai implikasi tingginya tingkat pengamalan umat Islam terhadap ajaran-ajaran Islam di Malaysia sudah dilaksanakan sejak masa pra penjajahan, masa penjajahan, pasca kemerdekaan 1957, tahun 80-an, dan tahun 90-an hingga saat ini. Perubahan-perubahan regulasi tersebut tidak serta merta mengatur sumber zakat yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pengelolaan profesional. Khusus di bidang pengelolaan zakat, pemerintah persekutuan memperhatikan bahwa potensi zakat semakin meningkat sesuai dengan kemajuan perekonomian masyarakat Muslim khususnya. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat, pemerintah melalui Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWIP) mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada tahun 1991 dalam rangka menciptakan pengelolaan zakat yang profesional dengan menerapkan sistem *corporate*.

Kata Kunci: zakat, Malaysia, ekonomi, *corporate*

Naskah diterima: 7 Agustus 2011, direvisi 8 November 2011, disetujui: 17 November 2011.

* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta Selatan. E-mail: nurzan_y@yahoo.co.id

Pendahuluan

Malaysia didominasi oleh masyarakat yang memiliki identitas Melayu-Muslim. Sejak masa kemerdekaan dan beberapa dekade setelahnya, Malaysia memperlihatkan rapatnya asosiasi antara keislaman dan kemelayuan. Bahkan, dalam Konstitusi Federal Pasal 160 (b) dinyatakan bahwa yang disebut Melayu adalah mereka yang beragama Islam, berbicara dan berbahasa Melayu dan mengikuti adat Melayu (*who professes the Muslim riligion, habitually speak the Malay language and conforms to Malay customs*).

Identitas yang diemban oleh Muslim-Melayu berimplikasi terhadap tingginya tingkat pengamalan ajaran-ajaran Islam dalam tata kehidupan. Salah satu pengamalan ajaran Islam yang bernilai dan punya muatan ekonomi adalah zakat. Penggunaan istilah zakat di Malaysia adalah merujuk kepada zakat harta. Sementara fitrah adalah zakat badan yang berbentuk personal dan dilaksanakan di bulan Ramadan. Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 Pahang (No. 3), misalnya, menafsirkan bahwa zakat adalah sebagian dari hasil penanaman padi dalam satu tahun dan yang lain adalah pendapatan perniagaan, hewan ternak termasuk uang simpanan emas dan perak. Sedangkan fitrah adalah sebagai sesuatu unit takaran beras atau barang yang sama nilai dengannya. Dan mesti dibayar Muslim berdasarkan hukum syarak.¹

Zakat dalam Lintasan Sejarah di Malaysia

Sebelum masa penjajahan, zakat di Malaysia dilaksanakan secara tradisional. Kebijakan dan regulasi mengenai zakat masih sangat kurang. Ketika itu, zakat tidak diatur secara sistematis di bawah Kerajaan (Pemerintah). Kebiasaan zakat dilaksanakan dengan cara membayarkannya oleh penduduk kampung kepada guru-guru agama untuk dibagikan kepada pada *ashnâf*. Dalam hal ini, guru-guru agama berkompeten sebagai amil zakat karena mereka dipandang cakap dalam persoalan *hawl*, *nishâb*, dan kadar zakat.²

Ketika pada masa penjajahan Inggris, intervensi mereka ke dalam negara Malaysia menimbulkan resistensi yang sengit dari kelompok Melayu terhadap hukum kolonial Inggris. Kondisi ini menyebabkan kekuasaan kolonial merubah metode pemerintahan mereka. Inggris berhasil mengkooptasi kelas penguasa pra-kolonial dengan merekrut mereka sebagai eselon menengah dalam struktur

¹Ahmad Hidayat Buang, ed., *Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2007), h. 356.

²Aidit bin Ghazali, "Zakat Administration in Malaysia", dalam Mohamed Ariff (ed), *Islam and the Economic Development of Southest Asia; the Islamic Voluntary Sector in Southest Asia*, (Singapore: ISEAS, 1991), h. 85.

aparatur negara kolonial di mana atasan langsung mereka adalah para pejabat administrator Inggris.³ Para Sultan masih punya sedikit pengaruh dalam kebijakan publik, dalam pengertian di mana para pejabat Inggris sangat memperhatikan kedudukan Sultan. Ini memberi kesan bahwa pemerintah kolonial Inggris masih perlu konsultasi dengan Sultan.

Oleh pemerintah kolonial Inggris, kebijakan Negeri-Negeri Melayu dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan Islam dan adat istiadat Melayu diserahkan kepada *Council of Religion and Malay Costom* (CRMC) atau Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu (MAIAM), sementara kebijakan lain seperti perundang-undangan umum, keuangan, dan pendidikan dikeluarkan dan diawasi oleh Inggris. Klasifikasi kebijakan ini memberi kesan seolah-olah pemerintah kolonial Inggris menjunjung tinggi status agama dan adat istiadat sebagai kompensasi atas hilangnya kedaulatan para penguasa pribumi.⁴

Dengan berdirinya MAIAM di setiap Negeri yang diawali oleh Negeri Kelantan, kebijakan zakat dan pengelolaannya diletakkan di bawah kekuasaan lembaga ini. Pada awal pelaksanaannya, *muzakkî* di setiap kampung membayar zakat kepada imam kampung dan sebagian hasil pungutan zakat diserahkan kepada kerajaan Negeri sebagai sumber pembiayaan negara.⁵

Meskipun Inggris memberikan kebijakan kepada MAIAM dalam persoalan yang berkaitan dengan Islam dan adat istiadat Melayu, namun Inggris tetap memberikan arah kebijakan melalui Majelis Mesyuarat Negeri untuk membuat peraturan tentang zakat. Atas nasihat Inggris, Kelantan membuat peraturan tentang zakat pada tahun 1907 melalui Notis Zakat Kelantan tahun 1907. Selanjutnya, Peraturan tahun 1907 ini berkembang dengan adanya penambahan dan perbaikan menjadi Notis Zakat No. 3 Tahun 1916, dan Notis Kutipan Fitrah No. 11 Tahun 1917. Notis Zakat No. 3 Tahun 1916 ini diganti oleh Enakmen Kutipan Zakat No. 4 Tahun 1927. Dengan Enakmen Majelis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No. 23 tahun 1938 diperkenalkan dua peraturan baru, yaitu Peraturan Kutipan Fitrah No. 73 Tahun 1938 dan Peraturan Kutipan Zakat No. 74 Tahun 1938 (No.1)⁶.

³Jomo K.S, *A Question of Class: Capital, the State, and the Uneven Development in Malaya*, (Singapore: New York: Oxford University Press, 1986), h. 245.

⁴Hua Wu Yin, *Class and Communalism in Malaysia: Politics in Dependent Capitalist State*, (London: Zed Books, 1983), h. 13.

⁵Aidit bin Ghazali, "Zakat Administration in Malaysia", h. 85-86.

⁶Enakmen ini sudah diganti dengan enakmen Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu dan Mahkamah Kadi Tahun 1953 (No.1). Enakmen Tahun 1953 ini juga telah diganti oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Tahun 1966 (No. 2) dan Enak-

Keberadaan aturan-aturan yang mengatur tentang zakat di beberapa Negeri Malaysia ini tidak serta merta menjelaskan bagaimana zakat bisa dikelola sehingga menjadi potensi penghimpunan dana yang dapat didistribusikan kepada umat Islam melalui aktivitas-aktivitas yang punya muatan ekonomi. Selain minimnya jumlah *muzakkî* di Malaysia karena tidak ditopang oleh kehidupan Melayu yang mapan dari segi ekonomi, pemerintah kolonial Inggris sebagai pemegang tampuk kekuasaan terkesan setengah hati dalam hal kebijakan zakat ini. Tidak sedikitpun kebijakan-kebijakan ekonomi Inggris yang pro-Melayu supaya orang Melayu bisa hidup secara layak.

Pasca kemerdekaan 30 Agustus 1957, Melayu di Malaysia berhasil mempertahankan simbol kesultanan sebagai sistem pemerintahannya. Dengan semangat kemelayuan dan nasionalisme, Malaysia kembali dipimpin oleh Tuanku Abdul Rahman. Kondisi perekonomian Malaysia kembali dipulihkan Pemerintah dengan melibatkan orang-orang Melayu di sektor-sektor ekonomi dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan akses ekonomi. Namun maksud baik pemerintah belum menunjukkan kemajuan ekonomi yang cukup berarti bagi orang Melayu. Di dunia bisnis contohnya, orang Melayu masih belum mampu bersaing dengan etnis lain seperti Cina.

Meskipun dari segi ekonomi orang Melayu masih tertinggal, namun pengalaman ajaran Islam, seperti zakat yang mempunyai nilai ekonomi, terus berlanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah Negeri-Negeri di Malaysia. Pemerintah Negeri mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk aturan-aturan (Enakmen) yang mengatur tentang zakat.

Hingga akhir tahun 1980-an, penanganan zakat di Malaysia masih jauh dari kesempurnaan. Sejak pemerintah melaksanakan kebijakan islamisasi yang menyeluruh, zakat turut menjadi perhatian utama pemerintah.⁷ setiap Negeri diberikan kepercayaan untuk mengelola zakat sebagaimana yang sudah terlaksana sebelumnya. Aidit bin Ghazali mengatakan bahwa Sejak urusan-urusan yang berhubungan dengan Islam menjadi kekuasaan pemerintah Negeri-Negeri, semua aspek yang berhubungan dengan persoalan zakat juga mejadi tanggung jawab Negeri-Negeri. Yang membuat kebijakan utama dan bentuk administrasinya adalah Majelis Agama masing-masing kecuali Kedah. Kedah mempunyai

men Tahun 1966 ini juga telah diganti oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Tahun 1994. Ahmad Hidayat Buang (ed), *Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2005), h. 81, 103.

⁷Syawal Kaslam, Hasan Bahrom, *Amalan Corporate Governance dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia*, Jurnal Pengurusan JAWHAR, Vol.1, No. 2, 2007, h. 55.

dewan tersendiri yang disebut dengan Komite Zakat (Jawatankuasa Zakat). Jawatan Zakat ini beroperasi di beberapa kantor dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Negeri.⁸

Meskipun zakat dikelola oleh Majelis Agama yang ada di 14 Negeri, namun hubungan antara Majelis-majelis tersebut dengan pemerintah Negeri masing-masing tidak sama. Setiap pemerintah Negeri mempunyai Departemen Urusan Agama Islam Negeri (*State Department of Islamic Affairs*). Jadi fungsi dan peran Departemen dan Majelis itu tergantung kepada dua faktor, yaitu siapa pimpinan Majelis Agamanya dan Apakah Majelis itu mengelola dana sendiri atau didanai oleh Negeri. Pada kenyataannya, Departemen Agama Islam berperan sebagai administrasi sekolah-sekolah agama, aktivitas dakwah, mempersiapkan kursus-kursus agama, melaksanakan hukum Islam, pengadministrasian belanja yang berhubungan dengan urusan-urusan Islam, dan pengadministrasian Peradilan Islam. Sedangkan Majelis Agama Negeri fokus kepada administrasi zakat, administrasi dana (*fund*) *Baitulmal* dan Wakaf.⁹ Berikut ini adalah tabel yang berhubungan dengan hubungan Departemen Agama Islam dan Majelis Agama Islam pada sembilan Negeri¹⁰

Tabel 1

Negeri	Majelis Agama Negeri	Pendanaan Sendiri	Subsidi Pemerintah	Ketua Majelis Agama
Perlis	-	-	-	Ditunjuk Pemerintah Negeri
Pulau Pinang	-	-	-	Ketua Departemen Agama
Kedah				
Perak	-	-	-	Ketua Departemen Agama
Terengganu	-	-	-	Ketua Departemen Agama
Pahang	-	-	-	Ditunjuk Pemerintah Negeri
Negeri Sembilan	-	-	-	Ketua Menteri
Melaka	-	-	-	State Exco
Johor	-	-	-	State exco

Independensi setiap Negeri sebagai administratif zakat khususnya, berimplikasi pada bentuk pengelolaan zakat. Di Wilayah Persekutuan (pemerintah pusat) dan Perak, misalnya, Majelis Agama Islamnya lebih efektif dalam mengelola

⁸Aidit bin Ghazali, "Zakat Administration in Malaysia", h. 86-87

⁹A Aidit bin Ghazali, "Zakat Administration in Malaysia", h. 87-88

¹⁰A Aidit bin Ghazali, "Zakat Administration in Malaysia", h. 89.

dana zakat. Majelis ini membolehkan dana zakat untuk dikembangkan (diproduktifkan) selain didistribusikan kepada *ashnâf* dan mereka lebih kreatif untuk menciptakan kesadaran umat Islam dalam membayar zakat.¹¹

Regulasi Zakat di Malaysia

Mengikuti struktur politik yang ada di Malaysia, zakat dikelola oleh masing-masing Negeri dan Negeri mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Selain sebagai pengelola, penanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Malaysia, Pemerintah melalui perwakilan kerajaan Negeri juga berperan dalam membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat. Undang-undang tentang zakat dibuat oleh Majelis Perundang-undangan Negeri. Setiap Negeri bebas untuk membuat perundang-undangan zakat. Meskipun mesti berada dalam wilayah undang-undang syariat Islam Negeri. Kebebasan pada kompetensi pembuatan Undang-undang zakat ini, berakibat pada beragamnya beberapa aspek pengelolaan zakat dan cara penegakan hukumnya. Selangor dan Wilayah Persekutuan telah menetapkan hukuman bagi kesalahan tidak membayar zakat dalam Akta atau Undang-undang kesalahan Pidana Syariah. Perkara-perkara yang ada dalam undang-undang boleh ditegakkan hukumannya tapi kalau peraturan zakat itu hanya dalam bentuk tambahan addendum (*facia enakmen*) yang tidak dimasukkan ke dalam lembaran Negara tidak boleh ditegakkan hukumannya.

Berkaitan dengan undang-undang zakat di Malaysia, Aidit Ghazali mengatakan bahwa ada tiga aspek utama berkaitan dengan undang-undang zakat di Malaysia. Pertama, jenis-jenis zakat yang dikumpulkan oleh lembaga resmi. Kedua, dakwaan pada pelanggaran pelaksanaan zakat. Ketiga, bentuk serta jumlah hukuman dan denda yang boleh dikenakan. Berikut ini adalah undang-undang yang mengatur tentang zakat berdasarkan 14 Negeri di Malaysia:¹²

¹¹ A Aidit bin Ghazali, "Zakat Administration in Malaysia", h. 88.

¹² Tabel ini di susun penulis, bersumber dari tulisan Ahmad Hidayat Buang, "Dilema Perundangan Zakat di Malaysia: Antara Penguatkuasaan dan Strategi Rujukan/Galakan/Insentif Membayar Zakat, Asmadi Mohamed Naim "Kesahan Pemetongan Caruman KWSP Gaji Pekerja dan Zakat Caruman KWSP Suatu Kajian Semula Menurut Persektif Perundangan Islam"; Aishah Bidin, "Isu Undang-Undang Berkaitan Pelaksanaan Zakat terhadap Syarikat di Malaysia," dalam Abdul Ghafar Isail dan Hailani Muji Tahir, (ed), *Zakat: Penseyariatan Perekonomian dan Perundangan*, (Kuala Lumpur: UKM,2006), Cet.I, h. 325-367.

Tabel 2

No	Negeri	UU/Peraturan	Keterangan
1	Kelantan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notis Zakat Kelantan Tahun 1907; 2. Notis zakat No. 3 Tahun 1916; 3. Notis Kutipan Fitrah No. 11 Tahun 1917; 4. Notis Tahun 1916 dipinda oleh Notis Zakat No. 2 Tahun 1924; 5. Enakmen kutipan zakat Kelantan (pindaan) 1927 (No. 4); 6. Enakmen Majelis Ugama Islam dan Adat Istiadat Mlayu Kelantan no. 23 tahun 1938 memperkenalkan 2 peraturan : <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Kutipan Fitrah No. 11 Tahun 1938; b. Peraturan Kutipan Zakat No. 74 Tahun 1938. 7. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu dan Mahkamah Kadi 1953 No. 1; 8. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan 1966 No. 2; 9. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan tahun 1994. 	<p>Diperkenalkan oleh Majelis Mesyuarat Negeri atas nasihat Inggris.</p> <p>UU ini di-<i>mansúkh</i> oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu dan Mahkamah Kadi 1953 No. 1</p> <p>Kelantan menerapkan UU Zakat dan Fitrah ini. Mahkamah Syariah punya peran aktif untuk memantau kutipan zakat. Contoh dalam kes “Majelis v. Musa & lain-lain”, Mahkamah mengenakan denda kepada 16 orang karena gagal membayar fitrah pada tahun 1947. Setiap mereka didenda RM15 atau dipenjara selama sebulan berdasarkan seksyen 8 Peraturan Kutipan Fitrah 1938.</p> <p>Di-<i>mansúkh</i> dengan Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan 1966 No. 2.</p> <p>Di-<i>mansúkh</i> oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan tahun 1994.</p>
2	Terengganu	UU Zakat Terengganu Tahun 1947	
3	Perlis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan-peraturan mengutip zakat dan fitrah tahun 1930 (Minit Paper Kerajaan AP. 50/583); 2. Enakmen Zakat dan Fitrah Perlis (No. 3) Tahun 1949; 3. Melalui Enakmen Tahun 1949 ini, keluar Peraturan Zakat dan Fitrah Perlis Tahun 1950 (LN. 14 of 51-s.s.Ps.531/1950 yang menghapus Peraturan Kutipan Zakat dan Fitrah Tahun 1930; 4. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perlis (pindaan) 1966 No. 6, 	<p>Laporan Tahunan Jabatan Zakat dan Fitrah Perlis Tahun 1953 melaporkan 10 orang petani yang enggan membayar zakat telah didakwa dan dihukum penjara.</p>

		<p>membatalkan Enakmen Tahun 1949, sementara Peraturan tahun 1950 tidak ada penjelasan masih berlaku atau sudah dihapuskan;</p> <p>5. Peraturan Tabdiran Zakat Padi pada tahun 1978 yg ditetapkan tanggal 10 Januari 1978 melalui Titah DYMM Sultan Kelantan dalam M.A 108/76.</p>	
4	Perak	Peraturan Zakat dan Fitrah Tahun 1952 No. 1222 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen Baitulmal Zakat dan Fitrah Perak Tahun 1951.	Tahun 1953 sebanyak 52 orang telah didakwa karena gagal membayar fitrah. Tahun 1953, tercatat sebanyak 69.000 orang, dan 84.000 orang tahun 1954 yang tidak membayar fitrah di seluruh Negeri Perak. Tahun 1956 Pejabat Agama Islam Negeri Perak telah menemukan sejumlah 49 orang di daerah Selama dan 38 orang di daerah Setiawan yang gagal membayar Fitrah.
5	Johor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enakmen Zakat dan Fitrah Johor Tahun 1957; 2. UU ini dipindah tahun 1962 (Peraturan Zakat dan Fitrah Johor Tahun 1962. 	Semua UU dari No. 1-5 telah di- <i>mansúkh</i> .
6	Kedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enakmen Zakat Kedah Tahun 1955 (No. 4); 2. Pindaan tahun 1962; 3. (Pindaan) Peraturan zakat Kedah Tahun 1982 (K.P.U 11). 	<p>Masih berlaku sampai hari ini.</p> <p>Tahun 1965 sampai 1966, ada 36 kasus kesalahan zakat. Hasil penelitian Mohd Ali Baharom menjelaskan bahwa sebelum tahun 1965 dan setelah tahun 1966 tidak pernah ada pendakwaan karena jawatan merinyu zakat yang bertanggung jawab menerapkan UU zakat adalah seorang Inspektur Polis pencek yang berpengalaman.</p> <p>Keengganan untuk membayar zakat di Kedah tahun 1965 dan 1966 itu dibagi 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keengganan memberi maklumat kepada amil keluasan tanah yang ditanam padi; 2. Keengganan membayar zakat;

-
3. Kesalahan menerima zakat tanpa tauliahkesalahan;
 4. Yang dilakukan oleh amil.

Tahun 1986, tercatat bahwa seorang petani di Kampung Sedakah Kedah pernah di dakwah dan dihukum sebanyak tiga kali karena tidak membayar zakat padi.

Hasil penelitian Scott tahun 1986 mengatakan bahwa ada kelemahan dalam tindakan hukum bagi petani padi yang enggan membayar zakat. Hak ini disebabkan oleh faktor sosial politik. Faktor sosial adalah amil-amil yang ditugaskan memungut zakat tidak mampu menerapkan karena pendapatan mereka tergantung kepada petani-petani tersebut Faktor politik adalah ketegasan amil nantinya akan menyebabkan kehilangan dukungan masyarakat terhadap partai politiknya.

Faktor lain :

1. perubahan mendasar oleh pihak pengelola zakat;
 2. kekurangan pakar dan tenaga di bidang pendakwaan;
 3. takut kepada tindak balas pembayar zakat yang enggan;
 4. kedudukan undang-undang yang tidak kuat;
 5. UU zakat tidak bisa memaksa pihak bank untuk mengekspos simpanan (tabungan) Muslim yang dipandang berkewajiban membayar zakat sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang cukai (pajak) pendapatan. (Menurut Aidit Ghazali tahun 1988);
 6. Pengelola zakat enggan untuk
-

			menerapkan kutipan zakat karena beranggapan bahwa keengganan membayar zakat kepada Majelis Agama bukan kesalahan yang serius. Jika ditindak, pihak yang mangkir kemungkinan menerima hukuman yang berat; 7. Sebagian UU atau peraturan zakat tersebut tidak diberitakan penerapannya.
7	Selangor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atoran Pentadbiran Ugama Islam (fitrah dan zakat) 1953 no. 1033 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Ugama Islam 1952 No. 3; 2. (Pindaan) SI. P.U. 53 tahun 1969; 3. Peraturan Kutipan dan Pembagian Zakat Fitrah Selangor (pindaan) tahun 1973; 	Peraturan ini me- <i>mansûkh</i> peraturan tahun 1953 dan 1969
8	Melaka	Peraturan menjalankan Kerja-kerja Zakat dan fitrah Melaka tahun 1960 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Ugama Islam Melaka 1959 No. 1.	Tidak ada penjelasan apakah peraturan ini masih berlaku setelah peraturan Zakat dan Fitrah, Urusan Wakaf, dan Baitulmal Negeri Melaka tahun 1982.
9	Serawak	(UU kecil) UU Zakat dan Fitrah Serawak Tahun 1966 (Swk. L.N. 94) yang ditetapkan berdasarkan UU Melayu Serawak (Cap. 51)	UU kecil ini akhirnya diserap ke dalam Majelis Islam (incorporation) Ordinance Cao. 105 (Reprinted) 1972).
10	Pahang	UU Kecil tahun 1970 yang ditetapkan berdasarkan Kaedah Zakat dan Fitrah Pahang 1970 (Phg mP.U. 18)	Pahang adalah Negeri yang paling aktif memberikan dakwaan di mahkamah berhubungan dengan kutipan zakat dan fitrah. Tahun 1985 ada 28 kasus, tahun 1986 ada 13 kasus dan tahun 1987 ada 126 kasus.
11	Sabah	Enakmen Zakat dan Fitrah Sabah Tahun 1993 No.6	Enakmen ini berdasarkan kepada draf UU zakat yg dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal Hukum Syarak dan Sivil, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri (Sekarang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia/ JAKIM). Banyak kesamaan antara draf Enakmen Zakat dan Fitrah Sabah tahun 1993 n0. 6 dengan draf UU

JAKIM ini (Draf Akta Zakat Wilayah Persekutuan).		
13	Wilayah Persekutuan	1. Kaedah Baitulmal Wilayah Persekutuan (perbelanjaan dan penggunaan) 1980 (P.U.(A) 154); 2. Kaedah tahun 1988 (P.U. (A) 436); 3. Kaedah tahun 1996 (P.U.(A)58).
14	Negeri Sembilan	Kaedah Zakat Negeri Sembilan 1998

Sumber Zakat di Malaysia

Ada empat sumber zakat di Malaysia, yakni: hasil pertanian, zakat perniagaan, zakat gaji pekerja (pendapatan), dan zakat perusahaan. Khusus pada zakat pertanian, mayoritas undang-undang yang berlaku di semua Negeri menjelaskan hanya padi sebagai sumber zakat seperti dalam Enakmen Pentadbiran Undang-undang Agama Islam (Fitrah dan Zakat) (pindaan) Tahun 1969 Pasal 9 menjelaskan bahwa zakat pertanian hanya dikenakan kepada padi saja,¹³ tanpa menyebutkan produktivitas tanaman lain seperti karet, kelapa sawit, coklat, kopi, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Memang berkenaan dengan zakat pertanian, surah al-An'âm [6] ayat 141, surah al-Baqarah [2] ayat 267, dan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibn 'Umar yang menjelaskan bahwa tanaman yang dialiri oleh air hujan, mata air, atau air dari bumi dikenakan zakat 10 persen, sedangkan yang diairi dengan sistem pengairan zakatnya adalah 5 persen,¹⁴ tidak menjelaskan secara rinci jenis zakat tanaman/pertanian yang dikeluarkan zakatnya, meskipun ada beberapa pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, mazhab Mâliki¹⁵ dan Syâfi'i¹⁶ mensyaratkan bahwa zakat dikenakan kepada makanan pokok suatu tempat, bisa dikeringkan dan tahan disimpan lama. Ada lima makanan pokok yang dimaksud di sini yaitu, padi, gandum, jagung, kurma, dan anggur. Kedua, mazhab Hanbali¹⁷ berpendapat bahwa zakat dikenakan kepada semua jenis tanaman makanan dengan syarat bisa ditimbang, disimpan, dikeringkan serta ditanam oleh manusia sendiri. Ini meliputi semua jenis makanan baik makanan pokok maupun tidak

¹³Mujaini Tarmin, *Zakat Pertanian Sistem dan Pelaksanaannya*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), h. 56.

¹⁴Diterjemahkan sendiri dari kitab Abû 'Ubayd, *Kitâb al-Amwâl*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), h. 577.

¹⁵Al-Dusuki, *Hâsiyyah al-Dusuki al-'Ilmiyyah*, (Bayrût: Dâr al-Kutub, 1996), Jilid II, h. 30.

¹⁶Al-Khâtib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1997), Jilid I, h. 565.

¹⁷Ibn Qudâmah, *al-Mughni*, (Riyadh: Dâr al-'Alim, 1997), Jilid 4, h. 55.

dengan syarat yang telah disebutkan. Ketiga, Abû Hanîfah¹⁸ berpendapat bahwa zakat pertanian diwajibkan kepada semua jenis tanaman makanan, baik makanan pokok ataupun tidak tanpa ada syarat. Argumennya, zakat pertanian ini diwajibkan kepada semua jenis tanaman karena tanaman adalah hasil yang tumbuh dari bumi dan diusahakan petani dengan niat menjalankan usaha pertanian untuk mendapatkan kekayaan. Selain itu, sasaran utama pengeluaran zakat adalah untuk mendistribusikan kekayaan. Oleh karena itu, kalau dibatasi kepada tanaman tertentu, sasaran zakat tidak akan tercapai. Untuk itu Abû Hanîfah mengklasifikasikan tanaman kepada beberapa jenis, yaitu: biji-bijian berupa makanan pokok, makanan bukan makanan pokok seperti ketumbar, tebu, dan lain-lain, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman bukan makanan seperti kapas (Q.s. al-An'âm [6]: 141).

Sebagaimana dikatakan oleh Shirlie Gordon, UU dan peraturan tentang zakat padi meskipun bermanfaat untuk orang Islam, namun pada hakikatnya dapat menekan kelompok miskin. Karena mewajibkan pembayaran zakat padi kepada mayoritas petani miskin. Kebanyakan petani penyewa tanah dari tuan tanah. UU dan peraturan mewajibkan petaninya bukan tuan tanah yang bayar zakat. Petani terbebani untuk membayar sewa dan zakat dari hasil yang sama.

Zakat yang bersumber dari gaji pekerja (pendapatan) diwajibkan pemerintah pusat dan berlaku untuk semua Negeri, melalui persetujuan pekerja yang dinyatakan dalam kontrak kerja. Pemerintah mewajibkan pekerja dan majikan untuk membayar. Sebagaimana pada zakat gaji (pendapatan), zakat perniagaan juga dianjurkan pemerintah dengan ketentuan pemerintah memberikan potongan pajak bagi *muzakkî* pendapatan dan perniagaan berdasarkan Akta Cukai Pendapatan Tahun 1967. Sedangkan zakat perusahaan di Malaysia belum populer dilaksanakan. Ini disebabkan oleh tiga faktor pertama, kelemahan dari segi undang-undang (*lacunae*) yang mengatur. Kedua struktur perusahaan yang berbeda dan kompleks dan ketiga, persoalan pembagian kekuasaan pemerintah pusat (kerajaan persekutuan) dan pemerintah Negeri (kerajaan Negeri).

Di tingkat Pemerintahan Pusat UU Sipil memulai Seksyen 2 Akta Tafsiran 1950 menggunakan istilah orang "persons" pada wajib pajak sedangkan Akta Cukai Pendapatan 1967 menggunakan istilah "individu" bagi wajib pajak. Kedua istilah ini mempunyai arti berbeda secara hukum. Istilah "orang" berarti badan perseorangan, perusahaan dan lembaga. Sedangkan "individu" berarti badan perseorangan. Jika Akta tahun 1950 memberikan porsi yang sama dengan pengerian

¹⁸Al-Kasani, *Bada't al-Sna't*, (Lubnan: Dâr Ihya' al-Turâth al-'Arabî, 1998), Jilid II, h. 178-179.

orang perorangan (individu) dan perusahaan, maka Akta Cukai 1967 jelas membedakan antara individu dan perusahaan.

Pelaksanaan zakat menjadi bidang kekuasaan pemerintah Negeri yang termaktub dalam enakmen setiap Negeri sedangkan perusahaan diatur oleh undang-undang sipil yang menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Adapun UU tentang perusahaan yang pernah berlaku di Malaysia adalah: Akta Syarikat 1965, Akta Pendaftaran Syarikat Syarikat 1965, Akta Pelaburan Kerajaan 1983, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perbankan, dan Institusi Kewangan 1989, Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993, dan Akta Suruhanjaya Syarikat 2001. Selain itu masih ada kaedah lain yang dipakai seperti Kod. Amalan Pengarah dan Kod. Tadbiurus Syarikat 1999 sebagai panduan perusahaan.

Zakat di Era Modern

Dari awal sejarah pelaksanaan zakat di Malaysia, pengelolaan zakat belum dikelola secara profesional, maka potensi zakat di Malaysia belum terjaring secara signifikan. Dengan kemajuan ekonomi di Malaysia, ekonomi orang Melayu pun mulai mengalami kemajuan. Potensi zakat yang cukup baik untuk mengembangkan kemajuan ekonomi,¹⁹ dapat dijadikan pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat. Zakat dikelola secara profesional dengan memakai pola *corporate governance*. Konsep *corporate governance* menekankan kepada pentingnya peranan dan tanggung jawab pengurus dalam mengelola zakat dan juga untuk menumbuhkan integritas dan keyakinan masyarakat. Peran dan tanggung jawab pengurus adalah melaksanakan pengelolaan zakat secara ikhlas, bertanggung jawab, amanah, dan profesional supaya tujuan organisasi dapat tercapai dan kepentingan masyarakat terhadap zakat dapat terpenuhi.²⁰

Berikut ini ada dua lembaga zakat di Malaysia yang mengamalkan pola *corporate governance* ini. Pertama, Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ di Wilayah Persekutuan berdiri 27 Desember 1990 sebagai lanjutan dari ide gagasan pembentukannya sejak Mei 1989. Munculnya gagasan pembentukan PPZ dimotori oleh adanya keresahan masyarakat Muslim tentang pengelolaan zakat yang tidak berkembang. Kelemahan institusi yang ada disebabkan oleh buruknya mena-

¹⁹ Tahun 2001, total perolehan zakat di Malaysia adalah RM 320.348.659. Dana ini berasal dari zakat pendapatan (profesi), zakat tabungan, zakat harta, *qadhâ* zakat, zakat fitrah, serta sedikit dari infak sedekah. Khusus untuk zakat profesi, PPZ membidik para *muzakki* yang berpenghasilan minimal RM 5.000 per bulan.

²⁰Shawal Kaslam, Hasan Bahrom, "Amalan Corporate Governance dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia", dalam Jurnal Pengurusan Jawhar, Vol. 1, No. 2, h. 53.

jemen pengelolaan zakat sehingga kinerja institusi pengelola zakat membuat *muzakkî* mengalami kesulitan untuk membayar zakat.

Berdasarkan realita ini, pemerintah mengontak konsultan asing *Coopers and Lybrand* untuk mengkaji potensi zakat. Konsultan ini ditugaskan untuk mendesain struktur dan sistem organisasi termasuk merancang model promosi dan kiat-kiat *marketing* guna meningkatkan pendapatan zakat. Desain konsultan berorientasi pada usulan PPZ menjadi sebuah perusahaan murni (korporat) dengan penekanan pada cara kerja yang profesional.

PPZ yang menginduk pada Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) di Kuala Lumpur pada awal berdirinya sampai 2003 dipimpin Moh. Dohan bin Abdul Latiff (CEO). Moh. Dohan merekrut SDM PPZ dari latar belakang pendidikan yang beragam dan mempersiapkan karakter penghimpunan zakat berbasis teknologi komputer. PPZ resmi beroperasi tanggal Maret 1991 dan diresmikan oleh PM Mahathir Mohammad. Adapun pengumpulan zakat di Wilayah Persekutuan periode 1991-2003 adalah:

Table 3

Tahun	Jumlah Zakat (RM)	Jumlah Kenaikan (RM)
1991	14,6 juta	-
1992	21,2 juta	6,6 juta
1993	26,8 juta	5,6 juta
1994	34,4 juta	7,6 juta
1995	33,6 juta	-0,8 juta
1996	42,9 juta	9,3 juta
1997	52,8 juta	9,9 juta
1998	45,7 juta	-7,1 juta
1999	36,0 juta	-9,7 juta
2000	58,9 juta	22,9 juta
2001	72,9 juta	14,0 juta
2002	84,5 juta	11,6 juta
2003	96,4 juta	11,9 juta

Sumber: Laporan Zakat 2003 PPZ MAIWP

Tahun 2001, perolehan zakat oleh PPZ sekitar RM 72,9 dikutip dari 40 ribu *muzakkî* yang berdomisili di Kuala Lumpur. 1/8 dari perolehan zakat ini yaitu RM. 8 juta diambil untuk biaya operasional dan gaji pegawai dan RM 64 juta diserahkan ke Baitulmal. Tahun 2002, perolehan zakat oleh PPZ sekitar RM 84,5 juta.

RM 4 juta berasal dari zakat perniagaan tabungan haji. Tahun 2002, tabungan haji mengeluarkan zakat RM 18 juta yang didistribusikan ke 14 Negeri bagian.

Kedua, Pusat Zakat Selangor (PZS). PZS didirikan tanggal 15 Februari 1994 sekaligus terdaftarnya Syarikat Mais Zakat Sdn. Bhd sebagai anak perusahaan sepenuhnya milik Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) dengan modal sebanyak RM 500.000.- Lembaga ini mulai beroperasi sepenuhnya pada bulan Oktober 1995. Adapun pengumpulan zakat di Selangor periode 1991-2003 adalah:

Table 4

Tahun	Jumlah Zakat (RM)	Jumlah Kenaikan (RM)
1991	7,5 juta	2,5 juta
1992	10,0 juta	0,3 juta
1993	10,3 juta	3,5 juta
1994	13,8 juta	-0,8 juta
1995	13,2 juta	14,7 juta
1996	27,9 juta	14,7 juta
1997	37,2 juta	9,3 juta
1998	37,3 juta	0,1 juta
1999	37,7 juta	0,4 juta
2000	46,2 juta	8,5 juta
2001	61,4 juta	15,2 juta
2002	78,7 juta	17,3 juta
2003	86,2 juta	7,5 juta

Sumber: Laporan Zakat 2003, PPZ MAWIP

Selain PPZ dan PZH, ada lima lembaga zakat swasta di Malaysia, yaitu: Lembaga Zakat Selangor (LZS), Pusat Urus Zakat (PUZ) di Pulau Pinang, Pusat Kutipan Zakat (PKZ) di Pahang, Pusat Zakat Negeri Sembilan (PZNS), dan Pusat Zakat Melaka (PZM). Di antara tujuh lembaga itu, hanya dua lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengelolah zakat sepenuhnya seperti memungut zakat dan mendistribusikannya yaitu Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan Pusat Urus Zakat (PUZ) di Pulau pinang sementara yang lain hanya bertugas memungut zakat saja sementara yang mendistribusikannya adalah Baitulmal (unit zakat) di bawah Majelis Agama Islam Negeri maing-masing.

Di samping tujuh lembaga zakat swasta di Malaysia, ada tujuh lembaga zakat pemerintah yang dikelola langsung oleh Majelis Agama Islam Negeri sebagai agensi kerajaan Negeri. Adapun tujuh Negeri tersebut adalah: (1) Majelis Agama Islam Negeri Johor; (2) Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Perak; (3)

Jabatan Zakat Negeri Kedah; (4) Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis; (5) Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan; (5) Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu; (6) Tabung Baitulmal Serawak.

Di bawah ini ditampilkan tabel yang menggambarkan penghimpunan zakat dari 14 Negeri bagian Malaysia pada tahun 1991, 1997, 1999, dan 2001. Tahun ini menggambarkan tiga hal penting yaitu: tahun 1991 merupakan tonggak kelahiran PPZ, tahun 1997 dan 1999 menjelaskan krisis moneter yang mempengaruhi naik turunnya nominal penghimpunan zakat dan tahun 2001 menggambarkan perolehan zakat terkini sebagai akhir periodisasi pemerintahan Mahathir.

Table 5

NO	NEGERI	1991 (RM)	1997 (RM)	1999 (RM)	2001 (RM)
1	Wilayah Persekutuan	14.639.933	52.850.927	36.019.248	72.886.035
2	Selangor	7.505.522	37.213.288	37.760.000	31.432.750
3	Johor	6.567.911	22.612.834	28.591.949	31.432.921
4	Terengganu	4.584.147	12.883.924	12.499.444	28.247.343
5	Perak	6.705.526	15.629.554	15.695.046	20.468.412
6	Pulau Pinang	2.623.824	9.716.224	10.388.466	17.550.949
7	Pahang	2.805.483	9.225.865	9.375.239	16.625.473
8	Kelantan	3.332.410	11.171.432	9.533.087	16.582.718
9	Negeri Sembilan	2.784.985	7.470.136	8.763.046	13.230.123
10	Kedah	2.757.326	6.409.012	8.399.694	12.487.629
11	Melaka	4.381.836	8.556.377	7.656.886	12.034.520
12	Serawak	1.507.696	3.907.769	4.611.670	8.318.162
13	Sabah	910.571	2.604.679	3.743.029	5.331.114
14	Perlis	1.541.811	3.203.206	2.469.199	3.720.504
	Jumlah	61.107.168	203.455.228	195.506.008	320.348.659

Zakat dan Kemiskinan

Mengenai penyaluran dana zakat, hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengurus PPZ mengatakan bahwa zakat di Malaysia disalurkan untuk dana-dana sosial dalam rangka memperkecil tingkat kemiskinan ditengah masyarakat Muslim-Melayu. Zakat digunakan untuk membantu para *ashnâf* yang membutuhkan bantuan. Meskipun ada dana zakat disalurkan untuk perniagaan, tujuannya adalah membantu pedagang kecil dalam berusaha. Bentuk akad yang dipakai adalah *qardh al-ḥasan*.

Meskipun semua dana zakat ini digunakan untuk program pengentasan kemiskinan masyarakat Muslim, akan jauh lebih kecil dari total dana yang dike-

luarkan pemerintahan untuk program pengentasan kemiskinan ini.²¹ Ini artinya, pemerintah Malaysia lebih berkompeten dalam upaya mengentaskan kemiskinan dalam upaya menciptakan sosio-ekonomi. Zakat adalah salah satu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah di era Mahathir tidak mau mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya upaya pengentasan kemiskinan, meskipun pemerintah telah merestui operasional PPZ tahun 1991 sebagai salah satu dari bentuk BUMN.

Dalam konteks kemiskinan di Malaysia, Mahathir mengatakan bahwa sebelum mardeka, Malaysia termasuk dalam kategori negara miskin. Dalam waktu 46 tahun Malaysia telah menjadi negara industri dan akan berlanjut kepada industri jasa berbasis teknologi informasi. Kemiskinan telah menurun dari 52,4% pada tahun 1970 menjadi 21% pada tahun 1983 dan hanya 5,1% pada 2002. 92% rumah-rumah di seluruh pedesaan sudah memiliki listrik, sementara 86% menerima air bersih pada tahun 2003. Demikian halnya dengan pendapatan per kapita meningkat hampir tiga kali lipat dari RM 1.098 per bulan di tahun 1983 menjadi RM 3.011 di tahun 2002. Walaupun target 30% kekayaan negara belum dicapai bumiputra tapi disparitas ekonomi antara kelompok-kelompok etnis jelas menurun. Pada tahun 1970, kaum bumiputra hanya memiliki 2,4% kekayaan negara. Tapi pada tahun 2002 sudah mencapai 18,7%. Kalau dalam nilai *agregat* berarti dari RM 126 juta pada tahun 1970 menjadi RM 73.162 juta pada tahun 2002.²²

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan zakat di Malaysia bukanlah satu-satunya upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Selain lembaga-lembaga zakat yang ada di tingkat persekutuan dan Negeri, ada lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Amanat Ikhtiar Malaysia (AIM), namun kebanyakan lembaga-lembaga tidak terlepas dari kontrol pemerintah. Adapun lembaga pemerintah yang bergerak untuk mengentaskan kemiskinan adalah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat (Jabatan Kebajikan Masyarakat) dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) yang mempunyai sembilan agensi yaitu: Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA), Institut Kemajuan Desa (INFRA),

²¹Abang Mohamad Shibli bin Abang Mohamad Nailie, "Peranan Zakat dalam Pembangunan Umat", dalam Nik Mustapha Nik Hassan, *Ekonomi Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*, (Kuala Lumpur: IKIM2002), Cet. I, h. 240-241.

²²Wawancara Liem Siok Lan dengan Mahathir tentang Malaysia Incorporated 2020 dalam buku Menembus Batas (*Beyond Boundaries*), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 121, 122 dan 124.

Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA), Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA), Bahagian Kemanjuaan Masyarakat (KEMAS), Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KETENGAH), Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) dan pihak Berkuasa Kemajuan Perkebunan Kecil Perusahaan Getah (RISDA).

Lembaga-lembaga ini mengembangkan aktivitas dan programnya dalam mendampingi kalangan miskin. Seperti penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan pelatihan. Bentuk subsidi langsung pemerintah yang tidak mendidik secara bertahap dihilangkan karena ini dapat menurunkan rasa percaya diri rakyat dan kurang menghargai daya juang bangsa Malaysia.²³

Di Malaysia, selain kuantitas kelompok miskin relatif kecil, tingkat kemiskinan pun dari segi penghasilan cukup sejahtera bila dibandingkan dengan Indonesia, misalnya, tahun 1998, *mustahiq* yang berhak menerima zakat adalah bumiputera miskin yang berpenghasilan di bawah RM 700. Sedangkan pada tahun 2003, *mustahiq* adalah bumiputera miskin yang berpenghasilan di bawah RM 1.200.

Penutup

Pemerintah Malaysia punya peran besar dalam pengaplikasian zakat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan melalui Enakmen di 14 Negeri. Sejak era Melayu tradisional sampai tahun 90-an, kebijakan dan pengelolaan zakat menjadi kekuasaan Majelis Agama Islam masing-masing Negeri.

Undang-undang zakat yang telah ada, belum secara utuh menerapkan zakat. Karena diperhatikan, Enakmen-enakmen tersebut belum mengatur semua sumber zakat yang telah disebutkan seperti zakat pertanian, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan zakat perusahaan. Tidak semua sumber zakat ini dikelola sepenuhnya oleh Negeri, seperti zakat perusahaan yang belum populer karena ini menjadi otoritas pemerintah pusat.

Seiring dengan kemajuan ekonomi umat Islam, pemerintah melihat bahwa potensi zakat semakin meningkat. Oleh karena itu, pada tahun 90-an, pemerintah mulai menggalakkan sistem pengelolaan zakat secara profesional yaitu dengan sistem *corporate*. Pengelolaan ini dimulai pertama kali oleh PPZ yang diresmikan Mahathir Mohamad pada tahun 1991.

Zakat yang mempunyai nilai ekonomi, turut mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun potensi zakat semakin

²³ Wawancara Liem Siok Lan dengan Mahathir. h. 137.

berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi orang Melayu khususnya dan Malaysia umumnya, zakat bukan satu-satunya upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Upaya lain untuk mengentaskan kemiskinan ini diprogram pemerintah secara khusus dengan adanya kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat (Jabatan Kebajikan Masyarakat) dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) yang khusus membidangnya. []

Pustaka Acuan

Al-Qur'ân al-Karîm

Abû 'Ubayd, *Kitâb al-Amwâl*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.

Bidin, Aishah, "Isu Undang-Undang Berkaitan Pelaksanaan Zakat Terhadap Syarikat di Malaysia", dalam Abdul Ghafar Isail dan Hailani Muji Tahir (ed.), *Zakat: Pensyariatannya, Perekonomian dan Perundangan*, Kuala Lumpur: UKM, 2006.

Bin Ghazali, Aidit, "Zakat Administration in Malaysia", dalam Mohamed Ariff (ed.), *Islam and the Economic Development of Southeast Asia; the Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*, Singapore: ISEAS, 1991.

Buang, Ahmad Hidayat (ed.), *Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran*, Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2005.

-----, *Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip dan amalan*, Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2007.

Dusuki, al-, *Hasyiyah al-Dusukî al-'Ilmiyyah*, Bayrût: Dâr al-Kutb, 1996.

Hua Wu Yin, *Class and Communalism in Malaysia: Politics in Dependent Capitalist State*, London: Zed Books, 1983.

Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, Riyâdh: Dâr al-'Alim, 1997.

Jomo K.S, *A Question of Class: Capital, the State, and the Uneven Development in Malaya*, Singapura: New York: Oxford University Press, 1986.

Kasani, al-, *Bada't al-Sna't*, Lubnan: Dâr Ih'yâ' al-Turâts al-'Arabî, 1998.

Kaslam, Syawal & Bahrom, Hasan, "Amalan Corporate Governance dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia", *Jurnal Pengurusan JAWHAR*, Vol. 1, No. 2, 2007.

Nailie, Abang Mohamad Shibli bin Abang Mohamad, "Peranan Zakat dalam Pembangunan Umat", dalam Nik Mustapha Nik Hassan, *Ekonomi Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*, Kuala Lumpur: IKIM, 2002.

Syabini, al-, al-Khatib, *Mughnî al-Muhtâj*, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1997.

Tarmin, Mujaini, *Zakat Pertanian Sistem dan Pelaksanaannya*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

Wawancara Liem Siok Lan dengan Mahathir tentang Malaysia Incorporated 2020 dalam buku *Menembus Batas (Beyond Boundaries)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.